



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

SOSIALISASI PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT TINGGI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

M. Taufik Rachman¹

¹Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia
email: rachman.taufik07@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 30 Januari 2022
Revisi Pertama : 30 Januari 2022
Dipublikasikan : 31 Januari 2022

Kata Kunci :

- BUMDES
- Pembangunan desa

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam hal ini mitra desa hanya menyediakan agen-agen independent sebagai pengawas pemerintahan desa dan pelayanan public yang ada di desa. Meskipun di desa sudah terdapat BPD (Badan Pemusyawaratan Desa).

Selain ingin memperbaiki kualitas pembangunan ekonomi desa, kegiatan ini juga memberikan kontribusi secara detail dalam hal memberikan pemahaman tentang pembangunan desa, penguatan ekonomi desa, pengelolaan bumdes yang efektif dan efisien yang selama ini menjadi perhatian masyarakat sampai yang terpenting yaitu sikap dari aparat desa dalam pembangunan desa. Dalam hal ini, salah satu perhatian tim kami adalah memberikan pengetahuan untuk menambah kompetensi pemerintah desa dan pengelola bumdes.

A. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun perdesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Penjelasan pada pasal 78 UU NO. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan

secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk melihat bagaimana kegiatan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bukit Tinggi yang meliputi beberapa tahapan kegiatan pembangunan diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi;
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa di Desa Bukit Tinggi;
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi;
4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Desa di Desa Bukit Tinggi;
5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa di Desa Bukit Tinggi.

B. Metode pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban caturdarma dosen Universitas Muhammadiyah Mataram.

Untuk mengetahui permasalahan di lapangan, sebelumnya dilakukan wawancara

kepada beberapa pihak, baik pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Selanjutnya pelaksana kegiatan melakukan pendampingan intensif untuk memecahkan masalah di atas.

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi. alternatif pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya usia produktif pernikahan, dampak pernikahan dini.
2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pemerintah desa tentang arti penting pernikahan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang peningkatan badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangunan desa di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Secara umum pelaksanaan sosialisasi ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode. Secara garis besar metode sosialisasi ini terbagi dua (2) yaitu :

1. Sosialisasi secara langsung adalah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu langsung dapat berdialog), metoda yang digunakan antara lain : ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi dan lain sebagainya.
2. Sosialisasi secara tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan

secara tidak langsung yaitu penyuluh tidak berhadapan dengan yang disuluh melainkan melalui media atau perantara, misalnya melalui radio, televisi, video, bahan bacaan dan lain sebagainya

Metode ini lebih efektif jika dibandingkan metode lain, karena dengan metode langsung narasumber dan peserta bisa melakukan dialog dua arah dan langsung tatap muka sehingga lebih memungkinkan proses Tanya jawab berjalan dengan lancar.

Oleh karena masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan bersifat homogen, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang disebut dengan istilah PEKA yaitu :

1. Persuasif artinya bahwa penyuluh (narasumber) dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
2. Edukatif artinya bahwa penyuluh harus bersikap dan bertingkah dengan penuh kesabaran dan ketekunan membangun/ mendampingi masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan .
3. Komunikatif artinya bahwa penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana yang memungkinkan peserta dengan narasumber sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang

bersikap akrab, terbuka dan timbal balik.

4. Akomodatif artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Antusias peserta sangat baik dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini, hal ini dapat digambarkan dengan aktifnya masyarakat dalam sesi diskusi dan Tanya jawab dengan narasumber. Dari hasil diskusi ini juga menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Bukit Tinggi yang meliputi beberapa tahapan kegiatan pembangunan diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi;
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa di Desa Bukit Tinggi;
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi;
4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Desa di Desa Bukit Tinggi;
5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan Desa di Desa Bukit Tinggi.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil Pengabdian Kepada masyarakat tentang Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat adalah (1) perwakilan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat memberikan apresiasi kegiatan pengabdian yang dilakukan karena membuka pemahaman terkait regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dengan partisipasi masyarakat pembangunan desa dan pengelolaan bumdes yang efektif dan efisien (2) Para peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan perwakilan pemerintah desa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, hal ini disebabkan karena mereka lebih mengetahui secara lebih mendalam terkait regulasi dan kebijakan pemerintah terkait dengan partisipasi masyarakat pembangunan desa dan pengelolaan bumdes yang efektif dan efisien; dan (3) berdasarkan diskusi dan sharing yang telah dilakukan, kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat sebagian besar berharap kegiatan ini terus dapat berlanjut dengan tema yang berbeda.

Rekomendasi kegiatan kedepan adalah melakukan PKM dengan berkolaborasi langsung dengan pemerintah setempat agar harapan dan kebijakan dapat direalisasikan secara cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Interferensi Komunitas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2003.
- _____, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerepan*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press. 2007.
- Adisasmita Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Cetakan Pertama. 2016.
- Mansyur M. Cholil. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional. 2004.
- Mikkelesen Britha. *Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.
- Ndraha Talizihudu. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1981.
- Rochajar dan Ardiantoro. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2011